

Diskursus Alternatif Hak Kesehatan Menstruasi: Menganalisa Keterlibatan Biyung Indonesia dalam Permasalahan Kemiskinan Menstruasi melalui Advokasi Pembalut Kain

Salsabila Laily Maulina¹, Milda Longgeita Pinem²

Submitted: April 25, 2025; Revised: October 20, 2025; Accepted: November 13, 2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis wacana menstruasi dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif Michel Foucault mengenai kekuasaan, wacana, dan pengetahuan. Melalui metode studi kasus, penelitian ini menelaah peran Biyung Indonesia dalam membangun wacana alternatif di tengah dominasi wacana arus utama. Wacana arus utama didominasi oleh norma sosial yang menstigmatisasi menstruasi sebagai hal tabu, sehingga membatasi percakapan terbuka dan melanggengkan praktik manajemen menstruasi yang mengabaikan hak kesehatan perempuan. Dominasi ini diperkuat oleh kebijakan negara dan kontrol industri yang cenderung mendorong penggunaan pembalut sekali pakai tanpa menyediakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sebagai respons, Biyung Indonesia mendorong keterbukaan, menyelenggarakan edukasi kesehatan menstruasi, dan mempromosikan pembalut kain sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Wacana menstruasi memiliki peran krusial dalam isu kesetaraan gender, hak atas kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan, yang menjadikannya sebagai agenda penting dalam pembangunan sosial. Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan mengeksplorasi bagaimana Biyung Indonesia mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Kata kunci: Advokasi Perempuan; Kemiskinan Menstruasi; Hak Kesehatan Menstruasi; Diskursus

Abstract

This study analyzes the discourse surrounding menstruation in society through the lens of Michel Foucault's theories on power, discourse, and knowledge. Using a case study method, the research explores how Biyung Indonesia constructs an alternative discourse to challenge the dominance of mainstream narratives. Mainstream discourse often stigmatizes menstruation as taboo, limiting open conversation and perpetuating practices that neglect women's health rights. This is reinforced by state policies and industry control, which tend to prioritize disposable pads while overlooking more sustainable alternatives. In response, Biyung Indonesia challenges this dominant narrative by advocating for open dialogue, promoting menstrual health education, and championing cloth pads as an environmentally friendly solution. The discourse on menstruation is crucial for advancing gender equality, health rights, and environmental sustainability, making it a vital issue in social development. This research fills a gap in the literature by examining how grassroots movements like Biyung Indonesia can foster policy changes that are more responsive to women's needs.

Keywords: Women's Advocacy; Period Poverty; Menstrual Health Rights; Discourse

Pendahuluan

Kemiskinan menstruasi telah menjadi masalah global yang berdampak signifikan pada kehidupan perempuan di berbagai belahan dunia. Data dari UNFPA (2020) menunjukkan bahwa di Inggris, satu dari sepuluh perempuan muda berusia 14-21 tahun mengalami kesulitan membeli produk menstruasi, sementara di Kenya angka ini mencapai lima puluh persen. Di Indonesia, masalah ini semakin kompleks dengan adanya kebijakan kontroversial melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2020 yang menghapus pembalut dari daftar Kebutuhan Hidup Layak. Kebijakan ini dinilai sebagai kemunduran dalam perjuangan hak-hak perempuan, terutama karena justru menggantikan posisi pembalut dengan barang seperti korek kuping. Pengakuan WHO pada Juni

¹ Departemen pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (email: salsabila.laily.maulina@mail.ugm.ac.id)

² Departemen pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (email: mildapinem@ugm.ac.id)

2022 yang menetapkan menstruasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kesehatan reproduksi menandai langkah penting dalam perjuangan keadilan menstruasi di tingkat global (WHO, 2022). Namun, dalam praktiknya, akses terhadap produk menstruasi yang layak di Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan temuan Yayasan Biyung Indonesia, sekitar 2.500 perempuan penerima donasi pembalut kain di 17 wilayah berbeda di Indonesia mengalami kesulitan membeli pembalut karena alasan ekonomi.

Kemiskinan menstruasi atau *period poverty* tidak sekadar menggambarkan keterbatasan akses terhadap produk menstruasi seperti pembalut sekali pakai, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dan kultural yang memengaruhi kemampuan perempuan untuk mengelola menstruasi secara aman, nyaman, dan bermartabat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tohit, et al. (2021) terdapat empat komponen utama dalam konsep kemiskinan menstruasi pertama, kesulitan dalam mendapatkan produk menstruasi seperti pembalut atau tampon akibat keterbatasan ekonomi, krisis bencana alam, atau masalah distribusi. Kedua, kurangnya fasilitas sanitasi yang layak, seperti tidak tersedianya air bersih, ruang privat, atau tempat yang memadai untuk mengelola kebersihan diri selama menstruasi. Ketiga, ketiadaan tempat pembuangan limbah menstruasi yang aman, seperti tidak adanya fasilitas untuk membuang pembalut bekas, yang dapat meningkatkan risiko kesehatan dan lingkungan. Keempat kurangnya edukasi terkait sistem reproduksi dan seksual sehingga mengakibatkan hadirnya pemahaman mistis dan tabu terkait menstruasi.

Dampak kemiskinan menstruasi bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Dari sisi kesehatan, penelitian Wijayanti dkk. (2018) menunjukkan bahwa beberapa jenis pembalut sekali pakai mengandung bahan kimia berbahaya serta bakteri yang dapat memicu infeksi serius pada organ reproduksi. Dalam bidang pendidikan, laporan SMERU Research Institute (2019) mengungkapkan bahwa banyak siswa terpaksa mangkir dari sekolah selama menstruasi karena keterbatasan fasilitas sanitasi yang memadai. Aspek ekonomi juga memiliki peran signifikan, sebagaimana hasil survei SINDIKASI (2022) yang menemukan bahwa hampir 40 persen pekerja perempuan tidak memiliki akses untuk mengambil cuti menstruasi. Selain itu, terdapat juga dampak lingkungan, mengingat pembalut sekali pakai memerlukan waktu hingga sekitar 800 tahun untuk terurai secara alami.

Dalam konteks inilah Biyung Indonesia muncul sebagai salah satu pelopor gerakan advokasi kesehatan menstruasi di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2018, organisasi ini telah mengembangkan pendekatan holistik yang tidak hanya menyediakan akses terhadap pembalut kain yang lebih aman dan terjangkau, tetapi juga membangun kesadaran kritis tentang hak kesehatan menstruasi melalui berbagai program edukasi dan advokasi publik. Hingga tahun 2024, Biyung Indonesia telah berhasil memproduksi sekitar 24.600 pembalut kain, menjangkau 1.146 peserta program edukasi, dan membentuk 17 kelompok produksi mandiri di 15 wilayah berbeda di Indonesia (Biyung Indonesia, 2024; Wawancara dengan Ani, pendiri Biyung Indonesia, November 2024). Keunikan pendekatan mereka terletak pada integrasi empat aspek utama yaitu kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana diskursus alternatif tentang hak kesehatan menstruasi dibangun oleh Biyung Indonesia melalui advokasi pembalut kain. Dengan memeriksa secara kritis kerja-kerja Biyung Indonesia, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi kekuasaan dan pengetahuan yang membentuk diskursus tentang kesehatan menstruasi. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Paskalia Gracia (2021) yang menyoroti strategi perempuan gelandangan dalam mengakses sanitasi dan produk menstruasi, serta Faiqah dan Puspitasari (2023) yang meninjau faktor penyebab dan dampak *period poverty*, lebih berfokus pada dimensi akses dan dampak sosial-ekonomi kemiskinan menstruasi. Namun, studi-studi tersebut belum menelaah bagaimana aktor non-negara, khususnya organisasi masyarakat sipil, berperan dalam mengkonstruksi diskursus alternatif dan praktik advokasi yang menantang narasi dominan tentang menstruasi.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan tiga isu strategis yaitu hak kesehatan menstruasi, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menganalisis kerja Biyung Indonesia yang memiliki fokus advokasi di wilayah Yogyakarta dan Papua sebagai studi kasus, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana solusi berbasis komunitas dapat secara simultan mendukung pencapaian beberapa target SDGs, khususnya tujuan ketiga (kesehatan dan kesejahteraan), kelima (kesetaraan gender), dan kedua belas (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dan mengatasi masalah kemiskinan menstruasi yang selama ini sering dipandang sebagai

isu yang terisolasi. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama penelitian terkait bagaimana terbentuknya diskursus alternatif hak kesehatan menstruasi yang dibangun oleh Biyung Indonesia dalam kemiskinan menstruasi dengan melihat pembalut kain sebagai sistem pendukung menstruasi.

Kerangka Teori

Michel Foucault menawarkan perspektif kritis tentang relasi diskursus, pengetahuan, dan kekuasaan yang tidak bersifat represif melainkan produktif. Dalam karya utamanya *Surveiller et Punir* (1975) dan *Histoire de la Sexualité* (1976), Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui pembentukan pengetahuan dan normalisasi perilaku. Diskursus bukan sekadar bahasa, melainkan praktik sosial yang memproduksi kebenaran (*regime of truth*) melalui institusi seperti sekolah, rumah sakit, atau penjara. Kekuasaan bersifat *polymorphe* yang tidak hanya melarang tapi juga merangsang wacana tertentu, seperti terlihat dalam diskursus seksualitas yang justru diperbincangkan secara intensif meski dibungkus norma moral. Konsep *bio-pouvoir* (kekuasaan biopolitik) menjelaskan bagaimana negara mengontrol populasi melalui pengaturan tubuh dan kesehatan reproduksi. Foucault menekankan bahwa setiap kekuasaan selalu memicu resistensi sehingga analisis kritis harus membongkar relasi kuasa tersembunyi sekaligus membuka ruang bagi subjektivitas alternatif.

Kerangka Foucault ini relevan untuk menganalisis isu kemiskinan menstruasi yang menjadi fokus penelitian. Diskursus dominan tentang menstruasi di masyarakat kerap dibentuk oleh norma tabu dan kepentingan industri yang mempromosikan pembalut sekali pakai sebagai solusi tunggal. Wacana ini menciptakan pengetahuan bahwa menstruasi harus disembunyikan dan hanya bisa dikelola dengan produk komersial. Padahal, menurut Tohit dkk (2021), kemiskinan menstruasi mencakup empat dimensi: (1) keterbatasan akses produk menstruasi akibat faktor ekonomi, (2) kurangnya fasilitas sanitasi layak, (3) sistem pembuangan limbah yang tidak aman, serta (4) minimnya edukasi kesehatan reproduksi. Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang menganggap menstruasi sebagai tabu.

Hak kesehatan menstruasi, sebagaimana dirumuskan Suryadana (2022) dan Westiani (2024), meliputi lima aspek fundamental: hak mendapatkan gizi seimbang untuk mengatasi nyeri menstruasi, akses terhadap pembalut yang terjangkau, ketersediaan sanitasi layak (termasuk air bersih dan ruang privat), kesempatan perawatan diri selama menstruasi, serta edukasi komprehensif tentang siklus menstruasi. Pemenuhan hak-hak ini sering terhambat oleh struktur kekuasaan yang mengontrol wacana seputar menstruasi melalui norma sosial dan dominasi pasar.

Di sinilah peran NGO seperti Biyung Indonesia menjadi krusial. Sebagai aktor pembangunan, NGO berfungsi sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat (Mardikanto & Soebianto, 2015) dengan dua pendekatan utama: operasional (langsung menyediakan solusi) dan advokasi (mendorong perubahan kebijakan). Menurut Willets (2000), NGO berbasis advokasi bekerja melalui lima tahapan: persiapan program, membangun jaringan, mengemas isu secara menarik, memengaruhi pemangku kebijakan dan media, serta mendorong perubahan kebijakan publik. Biyung Indonesia mengaplikasikan pendekatan ini dengan menciptakan diskursus alternatif yang menantang narasi dominan tentang menstruasi, antara lain melalui promosi pembalut kain dan edukasi kesehatan reproduksi. Namun, resistensi yang dibangun oleh Biyung Indonesia lebih bersifat praktis dan kultural, bukan bentuk perlawanan struktural terhadap sistem patriarki. Gerakan ini bekerja melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi perempuan dan pembentukan kesadaran kritis tentang kesehatan reproduksi, sebagaimana dijelaskan oleh Moser (1993) dalam kerangka *Gender and Development* (GAD) bahwa pemberdayaan ekonomi dapat menjadi pintu masuk menuju kesadaran gender, meski belum otomatis menantang struktur patriarki secara langsung. Dengan demikian, perubahan yang dicapai Biyung Indonesia lebih tepat dipahami sebagai transformasi kesadaran dan praktik keseharian.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus ini memberikan ruang pada peneliti untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu kasus agar dapat mengkonstruksi kenyataan yang ada (Yin, 2009). Studi kasus dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam strategi advokasi, edukasi, dan pemberdayaan komunitas dalam menghadapi kemiskinan menstruasi. Penelitian berfokus pada kontestasi wacana antara narasi mainstream yang memandang menstruasi sebagai isu tabu dengan solusi pembalut sekali pakai,

berhadapan dengan diskursus alternatif Biyung Indonesia yang mempromosikan pembalut kain dan pendidikan kesehatan menstruasi. Data penelitian ini dikumpulkan melalui empat teknik utama. Pertama, observasi non-partisipan dilakukan terhadap toilet umum di Terminal Pati, Pakuwon Mall Yogyakarta, Swiss-Belhotel, serta fasilitas toilet di Fakultas FISIPOL UGM, ditambah dengan observasi terhadap kemasan pembalut dan aktivitas Biyung Indonesia di Papua dan Yogyakarta pada periode Oktober 2024 hingga Januari 2025.

Kedua, wawancara mendalam dilaksanakan secara tatap muka maupun daring dengan informan dari berbagai latar belakang, yaitu: (1) pengelola dan aktivis Biyung Indonesia, untuk menggali strategi advokasi, bentuk intervensi, serta tantangan dalam mengimplementasikan program; (2) komunitas yang bekerjasama dengan Biyung Indonesia, untuk memahami pola kolaborasi, peran jejaring, dan dukungan dalam memperluas advokasi; (3) penerima advokasi Biyung, untuk melihat pengalaman langsung dalam menggunakan produk pembalut kain, perubahan pengetahuan, serta hambatan dalam mengakses kesehatan menstruasi; dan (4) masyarakat umum, untuk menangkap persepsi yang lebih luas, termasuk stigma sosial, norma budaya, serta respon terhadap isu kesehatan menstruasi.

Adanya kategorisasi informan penerima advokasi Biyung dan masyarakat umum dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat dikomparasikan secara lebih tajam. Penerima advokasi memberikan gambaran mengenai dampak langsung dan pengalaman personal dari intervensi Biyung, sedangkan masyarakat umum menghadirkan konteks sosial-budaya yang lebih luas yang memengaruhi kondisi mereka saat mengalami menstruasi. Dengan demikian, pemisahan kategori ini penting untuk memahami diskursus kesehatan menstruasi dari dua lapis analisis: pertama, bagaimana advokasi memengaruhi individu penerima; kedua, bagaimana lingkungan sosial yang lebih luas turut membentuk pemahaman terkait menstruasi dan pembalut kain.

Ketiga, analisis media sosial dilakukan terhadap konten terkait menstruasi di platform Twitter, TikTok, Instagram, serta website Biyung Indonesia, guna menangkap dinamika wacana publik dan representasi isu kesehatan menstruasi di ruang digital.

Keempat, studi dokumentasi dan kepustakaan digunakan untuk memperkuat data primer, sekaligus memberikan kerangka konseptual bagi analisis diskursus yang dikembangkan.

Informan penelitian terdiri dari 7 orang yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan terbagi dalam empat kategori sebagai berikut.

Kategori Informan	Nama/Inisial Informan dan Usia	Latar Belakang Informan	Tanggal Wawancara
I (Pihak pemberi advokasi)	Kak Ani (46)	Pendiri dan direktur Biyung Indonesia	29 November 2024
II (Komunitas yang bekerjasama)	Kak Bani (20)	Koordinator Komunitas Leafy Pads	7 Januari 2025
	Kak Rosa (40)	Pendiri Rumah KEWITA Papua	19 Januari 2025
III (Penerima advokasi Biyung Indonesia)	Kak Jannah (26)	Dosen dan konten kreator kesehatan reproduksi	23 Desember 2024
	Kak Afnata (21)	Mahasiswa S1	18 November 2024
IV (Masyarakat umum)	Ibu A (30)	Ibu Rumah Tangga	25 Desember 2024
	Kak W (21)	Mahasiswa	18 November 2024

Table 1. Kategori Informan

Sumber: Peneliti (2025)

Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analitis ini

memungkinkan identifikasi tema-tema utama seperti bentuk resistensi, diskursus *mainstream*, dan praktik advokasi. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi metode (menggabungkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen) serta triangulasi sumber (membandingkan pandangan informan dari kategori berbeda). Selain itu, peneliti melakukan *member check* kepada informan utama untuk memastikan keakuratan interpretasi data. Dengan kerangka metodologis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang valid, kontekstual, dan reflektif terhadap praktik advokasi Biyung Indonesia dalam membangun diskursus alternatif hak kesehatan menstruasi.

Hasil

Gerakan Perempuan Bantu Perempuan untuk Keadilan Menstruasi Biyung Indonesia

Biyung Indonesia adalah organisasi yang didirikan pada tahun 2018 dengan komitmen untuk mengatasi kemiskinan menstruasi di Indonesia melalui gerakan Perempuan Bantu Perempuan untuk Keadilan Menstruasi. Fokus utama organisasi ini adalah memberikan edukasi, advokasi, dan pemberdayaan bagi perempuan agar dapat menjalani menstruasi secara sehat, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi. Visi Biyung Indonesia adalah mewujudkan masyarakat di mana setiap individu terutama mereka yang mengalami menstruasi memiliki akses terhadap kesehatan menstruasi yang layak, bebas dari stigma, dan memiliki kesejahteraan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, Biyung Indonesia memiliki tiga misi utama: (1) membuka ruang aman bagi individu untuk mengakses hak menstruasi sehat, (2) mendorong terciptanya sistem pendukung pemenuhan hak menstruasi, dan (3) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan keadilan menstruasi.

Salah satu strategi utama Biyung Indonesia dalam mencapai tujuannya adalah dengan menggunakan pembalut kain sebagai media edukasi yang multifungsi. Pembalut kain diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis, sekaligus sarana untuk membuka diskusi mengenai hak kesehatan menstruasi dan pemberdayaan perempuan. Namun, pendekatan ini juga menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Sebagian informan menilai pembalut kain masih kurang praktis untuk digunakan dalam aktivitas harian, terutama di wilayah dengan keterbatasan air bersih dan ruang privat untuk mencuci. Selain itu, masih ada norma sosial dan persepsi kebersihan yang membuat sebagian perempuan merasa canggung menggunakannya. Biyung Indonesia merespons dinamika ini dengan menekankan pentingnya pilihan bebas dan kesadaran kritis, bukan pemaksaan penggunaan produk tertentu. Dengan demikian, pembalut kain diposisikan bukan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai bagian dari sistem pendukung yang lebih luas untuk mewujudkan keadilan menstruasi yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui pembalut kain, Biyung Indonesia mendorong perempuan untuk lebih memahami tubuh mereka, menghilangkan stigma seputar menstruasi, serta memberikan pelatihan keterampilan menjahit sebagai sumber penghasilan tambahan. Selain itu, penggunaan pembalut kain juga mendukung upaya pengurangan sampah non-organik, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang diusung oleh organisasi ini.

Untuk mewujudkan misinya, Biyung Indonesia menjalankan beberapa program utama. Program Edukasi dirancang untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan menstruasi melalui media sosial dan pertemuan tatap muka, terutama di daerah terpencil seperti Papua. Program ini bertujuan untuk menjangkau kelompok perempuan yang memiliki keterbatasan akses informasi dan ekonomi. Program Pemberdayaan berfokus pada pelatihan produksi pembalut kain, termasuk pelatihan manajemen usaha seperti menghitung biaya produksi, pemasaran, dan penyusunan rencana bisnis sederhana. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran kesehatan tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi perempuan. Selain itu, Biyung Indonesia juga mengadakan Program Donasi "*Period Sisters*", yaitu penggalangan dana untuk menyediakan pembalut kain bagi perempuan rentan yang kesulitan mengakses produk menstruasi.



Gambar 1. Program Edukasi dan Program Donasi “Period Sisters” Biyung Indonesia dalam kegiatan Sodevfest PSdK UGM
Sumber: Peneliti (2025)

Dalam menjalankan program-programnya, Biyung Indonesia bekerja sama dengan berbagai komunitas lokal, salah satunya adalah Rumah KEWITA di Papua. Kolaborasi ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas sekaligus memastikan keberlanjutan program di tingkat akar rumput. Peran komunitas mitra sangat krusial, mulai dari menyelenggarakan pelatihan, mendistribusikan pembalut kain, hingga melakukan advokasi untuk menghapus stigma menstruasi. Selain itu, Biyung Indonesia juga aktif berkolaborasi dengan komunitas lain seperti Leafy Pads melalui media sosial untuk memperluas jangkauan edukasi, seperti dalam kampanye International Women's Day.

“Peran kami sebagai komunitas adalah untuk menjadi penggerak dan fasilitator perubahan di tingkat lokal, dengan memberikan edukasi, melatih keterampilan praktis, dan membangun jaringan solidaritas antar perempuan di Papua. Melalui upaya ini, kami ingin memastikan bahwa informasi tentang kemiskinan menstruasi, hak kesehatan reproduksi, dan penggunaan pembalut kain sampai dan diterima oleh sebanyak mungkin perempuan di wilayah kami.” Kak Rosa (40), kategori informan II, 19 Januari 2025.

Dukungan dari komunitas mitra menjadi kunci keberhasilan gerakan ini. Kolaborasi dengan Biyung Indonesia didasari oleh kesamaan visi untuk menciptakan perubahan nyata dalam isu kesehatan menstruasi. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Biyung Indonesia tidak hanya membantu perempuan mengatasi kemiskinan menstruasi tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing. Dengan demikian, gerakan ini berkontribusi pada peningkatan kesehatan reproduksi dan kesadaran gender di tingkat komunitas, yang menjadi fondasi penting bagi upaya kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Namun, bentuk transformasi yang terjadi masih terbatas pada level mikro (individu dan komunitas), belum sampai pada perubahan struktur sosial atau kebijakan yang lebih luas.

Komparasi Hadirnya Praktik Diskursus Mainstream dan Diskursus Alternatif dalam Melakukan Pengelolaan Menstruasi

Penelitian ini membandingkan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan menstruasi melalui dua diskursus yang dominan: mainstream (konvensional) dan alternatif (kritis). Diskursus *mainstream* cenderung mempertahankan pandangan tradisional, seperti penggunaan pembalut sekali pakai karena alasan kepraktisan, sementara diskursus alternatif mendorong perubahan dengan mempertimbangkan kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan. Secara ringkas akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tema	Diskursus Mainstream	Diskursus Alternatif
Pemaknaan pengelolaan menstruasi	Persepsi pemakaian pembalut kain dianggap sebagai hal yang “ribet”	Persepsi pemakaian pembalut kain dipandang sebagai bagian dari upaya beradaptasi dengan kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan dan sehat

	Pentingnya perawatan diri saat menstruasi masih dipahami secara terbatas	Pentingnya perawatan diri telah dimiliki kesadaran dan pemahaman yang baik
	Asupan gizi saat menstruasi masih mengikuti mitos yang berkembang dan belum mengerti asupan gizi yang baik	Asupan gizi saat menstruasi dipahami dengan kesadaran yang lebih baik dalam menjaga asupan makanan, obat, dan air minum.
Pengaruh stigma negatif masyarakat	Individu cenderung sangat terpengaruh oleh stigma negatif yang berkembang	Ketahanan terhadap pengaruh stigma negatif dan cenderung bersikap kritis dalam menyikapi mitos maupun fakta yang beredar terkait menstruasi.
	Menggunakan istilah-istilah khusus dalam menyebut hal-hal yang berkaitan dengan menstruasi	Tidak menggunakan kiasan dalam penyebutan hal-hal yang berkaitan dengan menstruasi dan melakukan pembicaraan terkait menstruasi secara terbuka di ruang publik dan dianggap sebagai hal yang normal dalam siklus kehidupan perempuan
Akses edukasi yang didapatkan	Tidak mendapatkan edukasi yang memadai, serta tidak memiliki inisiatif yang baik untuk aktif mencari tahu.	Cenderung lebih proaktif dalam mencari sumber informasi edukasi dan lebih terbuka dalam berdiskusi mengenai pengalaman menstruasi
Kesadaran terhadap lingkungan dan kesehatan	Anggapan bahwa untuk beralih ke pembalut kain hanya dapat dilakukan oleh individu yang sudah <i>"eco living"</i> dan tidak menyadari bahaya bahan kimia pembalut plastik	Kesadaran menjaga lingkungan muncul dari pemaknaan pribadi yang mendalam dan pembalut kain dianggap menjadi alternatif yang lebih aman dan ramah bagi tubuh
Dukungan lingkungan sosial	Tidak hadirnya dukungan sosial	Mendapatkan dukungan sosial baik dari keluarga atau lingkungan terdekat lainnya

Table 2. Hasil Tema yang Muncul

Sumber: Peneliti (2025)

Masyarakat dengan diskursus *mainstream* menganggap pembalut kain "ribet" karena faktor kebiasaan dan kenyamanan. Mereka berpendapat bahwa pembalut sekali pakai lebih praktis, terutama saat beraktivitas di luar rumah, dimana mencuci dan mengeringkan pembalut kain dianggap merepotkan. Sebagian juga memandang pengguna pembalut kain sebagai orang yang terlalu perhitungan secara finansial. Di sisi lain, penganut diskursus alternatif melihat "keribetan" tersebut sebagai bagian dari adaptasi menuju gaya hidup lebih sehat dan ramah lingkungan. Bagi mereka, penggunaan pembalut kain tidak hanya menghemat biaya tetapi juga mendukung UMKM perempuan dan mengurangi sampah plastik.

"Kalau orang perhitungan pakainya pembalut kain, karenakan bisa dicuci dan dipakai lagi. Jadi menurutku orang-orang yang pakai pembalut plastik itu mereka yang anti ribet gitu." Ibu A (30), kategori informan IV.

"Menurut saya nggak ribet karena saya juga cuci baju nyuci sendiri, jadi casually sesuatu yang saya lakukan sehari hari." Kak Afnata (21), Kategori Informan III.

Individu dengan diskursus *mainstream* menyadari pentingnya perawatan menstruasi, tetapi pemahaman mereka masih terbatas. Mereka cenderung mengabaikan aspek seperti olahraga dan pola istirahat yang cukup karena fokus pada tanggung jawab domestik. Sebaliknya, kelompok diskursus alternatif lebih proaktif dalam menjaga kesehatan menstruasi, seperti rutin mengganti pembalut setiap 4-5 jam, melakukan yoga, dan memperhatikan kebersihan. Edukasi dari komunitas seperti Biyung Indonesia berperan besar dalam meningkatkan kesadaran ini.

"Saat menstruasi harus tetap bisa mengurus suami dengan baik. Cara perawatan diri ga terlalu di perhatikan sih, yang penting tubuh sehat-sehat saja. Paling penting mengganti softex kalau sudah penuh." Ibu A (30), kategori informan IV.

"Untuk kebersihan sudah, terus olahraga yoga, sudah save video untuk mempraktikkan." Kak Jannah (26), kategori informan III.

Perbedaan juga terlihat dalam pola konsumsi. Penganut diskursus *mainstream* sering terpengaruh mitos, seperti pantangan minum es atau soda, tanpa memperhatikan nutrisi seimbang. Sementara itu, kelompok diskursus alternatif lebih sadar akan pentingnya asupan bergizi, seperti memperbanyak buah, sayur, dan tablet tambah darah untuk mencegah anemia.

"Nggak juga mbak, saya saat menstruasi kadang pengen banyak makan dan kadang malah ga mau makan sama sekali. yang pas fase mau makan saya ga pilih-pilih makanan. Paling mitos ga boleh minum dingin dan lain lain tidak saya lakukan." Kak W (21), kategori informan IV.

"Aku memperbanyak minum air putih dan konsumsi tablet tambah darah." Kak Jannah (26), kategori informan III.

Stigma seperti menstruasi adalah hal "kotor" atau "pembawa sial" masih kuat dalam diskursus *mainstream*, terutama di lingkungan konservatif. Hal ini membuat banyak perempuan merasa tidak nyaman membicarakan menstruasi secara terbuka. Sebaliknya, penganut diskursus alternatif bersikap kritis terhadap mitos-mitos tersebut dan aktif meluruskan informasi yang salah melalui diskusi dan media sosial.

"Jadi dulu setau aku kalo lagi menstruasi ga boleh ke masjid, terus emang masyarakat menurut aku melihat menstruasi sebagai hal yang kotor sering dibilang jadi sarang setan. Jadi stigma masih sangat berpengaruh bagi aku apalagi aku tinggal di lingkungan konservatif." Kak W (21), kategori informan IV.

"Kadang dianggapnya darah kotor dan najis, banyak mitos-mitos kayak ga boleh keramas. Aku kaget ada mitos cuci muka pakai darah menstruasi dapat menyembuhkan jerawat. Kayak jengkel aja kok bisa gitu dipercaya kayak gitu. Saya menanggapinya cari kebenarannya dulu, kalau udah tau kebenarannya saya share ke teman atau mahasiswa kalau fakta sebenarnya seperti apa." Kak Jannah (26), kategori informan III.

Masyarakat *mainstream* sering menggunakan istilah samaran seperti "datang bulan" atau "roti Jepang" untuk menyebut menstruasi, mencerminkan budaya tabu. Sementara itu, kelompok alternatif lebih terbuka menggunakan istilah medis yang jelas, mendorong normalisasi pembicaraan tentang menstruasi.



Gambar 2. Hadirnya komparasi antara opini masyarakat dalam melihat kondisi menstruasi di Indonesia yang dianggap hal memalukan dengan opini masyarakat yang mengajak kebebasan berbicara terkait menstruasi pada media sosial Twitter

Sumber: twitter.com (2025)

Kurangnya edukasi menstruasi di sekolah dan keluarga membuat masyarakat *mainstream* tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pilihan produk atau hak kesehatan menstruasi. Sebaliknya, kelompok alternatif aktif mencari informasi melalui media sosial, komunitas, atau konten kreator kespro (kesehatan reproduksi), seperti Biyung Indonesia dan UNFPA.

"Kurang banget ya mbak, dulu juga sekolah gaada edukasi kayak gitu padahal itu hal penting. Dulu ada kejadian pembalut bekas haid di dalam kelas waktu SD ga di buang jadi rame. Kita juga ga dikasih pilihan antara pembalut plastik atau kain, cuman kalau menstruasi ya yang penting ga bocor. Pilihan itu memang ada di kita, tapi ga semua informasi itu datang ke kita. Menurut aku untuk informasi itu belum sampai ke masyarakat sendiri." Kak W (21), kategori informan IV.

"Dari sosial media, dan kebetulan yang aku follow di sosial media itu teman-teman kreator seperti biyung, dan yang ngomongin kespro. Jadi aku mendapatkan informasi komprehensif dari situ." Kak Jannah (26), kategori informan III.

Masyarakat *mainstream* cenderung menganggap isu lingkungan bukan tanggung jawab individu sehingga tetap menggunakan pembalut plastik. Mereka juga kurang peduli terhadap risiko bahan kimia dalam pembalut sekali pakai. Sementara itu, kelompok alternatif memilih pembalut kain karena alasan kesehatan bebas bahan kimia dan lingkungan mengurangi sampah plastik.

"Karena kalau kesehatan menurut aku tergantung orangnya. Kita pake pembalut plastik pun kalau orangnya steril ya sehat-sehat aja. Buktinya saya sekarang sehat-sehat saja." Ibu A (30), kategori informan IV.



Gambar 3. Komparasi opini diskursus mainstream dan diskursus alternatif terkait lingkungan pada media sosial Twitter

Sumber: twitter.com & tiktok.com (2025)

"Meski belum sepenuhnya beralih menggunakan pembalut kain, alasan utama saya adalah merasa bersalah ketika menyumbang sampah, juga merasa sudah mendapatkan peningkatan kapasitas dan pemahaman kemiskinan menstruasi dari biyung dan suka ngomongin isu ini, masak aku gak pakai, jadi aku tergerak untuk pakai. Terus dari segi hemat lebih hemat dan juga support UMKM perempuan. Kalau pembalut sekali pakai ada bahan kimia, jadi merasa lebih aman kalau pakai kain." Kak Jannah (26), kategori informan III.

Dukungan keluarga dan teman sangat memengaruhi pilihan individu. Lingkungan *mainstream* sering tidak mendorong penggunaan pembalut kain, sementara komunitas alternatif (seperti CoP UNFPA) memberikan ruang diskusi yang mendukung perubahan perilaku.

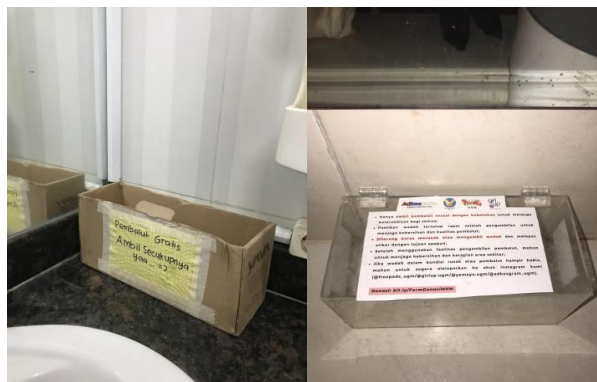
"Nggak, keluarga di rumah tidak ada yang menggunakan dan teman-teman ga ada yang pake. Pernah dapat edukasi pembalut kain sebelumnya tapi saya ga tertarik." Ibu A (30), kategori informan IV.

"Kalau lingkungan saya sendiri memang mendukung sih mbak, terutama ibu saya sendiri emang memakai pembalut kain dan di lingkungan inti saya itu perempuannya sudah memakai pembalut kain." Kak Afnata (21), kategori informan III.

"Kalau dalam komunitas bersama teman-teman saling mendukung. Tapi kalau lingkungan yang lain lebih terkesan cuek gitu. Saya dulu bergabung dalam Community of Practice (CoP) Konten Kreator Kespro UNFPA Indonesia sebagai individu yang aktif ngomongin isu-isu kespro dan kesetaraan gender di sosial media. Kebanyakan teman-teman yang bergabung dari organisasi atau komunitas yang ada di isu itu." Kak Jannah (26), kategori informan III.

Kondisi Kemiskinan Menstruasi yang Tertangkap

Melalui komparasi pada uraian sebelumnya telah dapat dilihat kondisi kemiskinan menstruasi pada pemahaman diskursus *mainstream*. Upaya penggambaran kemiskinan menstruasi dalam penelitian ini juga dilakukan melalui observasi dan kondisi komunitas yang bekerjasama dengan Biyung Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan fakta memprihatinkan tentang kemiskinan menstruasi di berbagai lapisan masyarakat. Di lingkungan akademik seperti FISIPOL UGM, program penyediaan pembalut gratis ternyata tidak berjalan optimal dimana kantung distribusi pembalut ditemukan kosong saat observasi. Kondisi serupa ditemukan di fasilitas umum seperti terminal, dimana toilet perempuan minim fasilitas pendukung seperti tempat sampah khusus pembalut, meski ada larangan membuang pembalut ke kloset. Ketimpangan gender juga terlihat dalam penyediaan toilet, dimana jumlah toilet perempuan sering disamakan dengan laki-laki padahal kebutuhan perempuan lebih tinggi saat menstruasi. Seorang informan menyatakan, "Negara belum menganggap kebutuhan menstruasi sebagai prioritas", tercermin dari minimnya infrastruktur pendukung.



Gambar 4. Hasil observasi toilet umum ditemukan adanya kantung penyediaan pembalut namun tidak ada isinya

Sumber: Peneliti (2025)

Di Papua, komunitas Rumah KEWITA mengidentifikasi enam masalah utama kemiskinan menstruasi. Rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi di sekolah menyebabkan minimnya pemahaman tentang menstruasi sehat. Penggunaan pembalut sintetis berkualitas rendah memicu iritasi dan diduga berkontribusi pada tingginya kasus kanker rahim. Secara ekonomi, harga pembalut yang mahal memberatkan pekerja harian dan pedagang kecil. Budaya setempat juga masih menganggap tabu pembicaraan tentang menstruasi. Dari sisi lingkungan, pembuangan pembalut sembarangan mencemari sungai karena kurangnya pengelolaan sampah yang baik. Namun, respons positif muncul setelah edukasi, yakni banyak perempuan mulai menggunakan dan menyebarkan informasi tentang pembalut kain.

Di kalangan mahasiswa FISIPOL UGM, komunitas Leafy Pads menemukan kesenjangan pengetahuan tentang alternatif produk menstruasi. Minimnya edukasi formal membuat mahasiswa tidak menyadari fasilitas kesehatan kampus seperti UKS. Leafy Pads merespons dengan kampanye edukasi melalui media sosial dan pemasangan stiker informatif di toilet kampus yang menjelaskan berbagai pilihan produk menstruasi beserta cara perawatannya. Upaya ini bertujuan mengubah persepsi bahwa pembalut kain adalah alternatif yang layak dan sehat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan menstruasi merupakan masalah multidimensi yang membutuhkan pendekatan holistik. Solusi tidak hanya terletak pada penyediaan produk menstruasi, tetapi juga meliputi pendidikan kesehatan reproduksi, perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi perempuan, dan perubahan budaya. Advokasi yang dilakukan berbagai komunitas membuktikan bahwa pendekatan partisipatif berbasis hak perempuan efektif dalam menciptakan perubahan berkelanjutan.

Diskusi

Biyung Indonesia mengidentifikasi rendahnya literasi kesehatan menstruasi di masyarakat, termasuk pemahaman dasar seperti siklus menstruasi dan kebutuhan gizi selama menstruasi. Melalui pendekatan berbasis kebutuhan, organisasi ini membangun kesadaran tentang pentingnya asupan gizi untuk kesehatan menstruasi, meskipun tantangan seperti pola makan tidak sehat dan ketidaksetaraan gender dalam akses makanan masih menghambat. Selain itu, Biyung menekankan konsep *wellbeing* menstruasi yang mencakup perawatan diri selama empat fase siklus menstruasi, termasuk aktivitas fisik dan kebersihan sanitasi. Advokasi mereka berfokus pada perubahan persepsi negatif tentang menstruasi, menciptakan ruang aman untuk diskusi, dan memperkenalkan pengetahuan dasar yang selama ini terabaikan.

Strategi Biyung Indonesia dalam edukasi menggunakan pendekatan kesadaran ketubuhan yang inklusif dan empatik. Mereka menghindari narasi yang menstigmatisasi, seperti mengganti istilah "mengalami menstruasi" dengan "menjalani menstruasi" untuk menghilangkan konotasi negatif serta untuk menumbuhkan rasa inklusivitas digunakan istilah "individu yang mengalami menstruasi" dikarenakan tidak semua perempuan mengalami menstruasi dan pengalaman menstruasi tidak hanya dialami oleh perempuan. Pembalut kain diperkenalkan oleh Biyung Indonesia bukan semata sebagai produk alternatif, melainkan sebagai bagian dari sistem pendukung menstruasi yang mempertimbangkan dimensi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi pembalut kain tidak selalu berjalan mudah. Faktor kebiasaan, kenyamanan, dan keterbatasan infrastruktur sanitasi menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Bagi sebagian perempuan, mencuci dan menjemur pembalut kain di ruang terbuka masih dianggap tabu atau memalukan, terutama di wilayah dengan norma konservatif. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam advokasi kesehatan menstruasi perlu disertai perubahan kultural dan kebijakan publik yang mendukung. Dengan demikian, keberhasilan advokasi Biyung Indonesia tidak hanya terletak pada produk yang dipromosikan, tetapi pada kemampuannya membangun kesadaran kolektif dan memperluas pilihan perempuan dalam mengelola menstruasi secara bermartabat dan berkelanjutan. Empat faktor utama yang mendorong adopsi pembalut kain adalah: (1) memori turun-temurun tentang penggunaan kain, (2) kesadaran lingkungan, (3) masalah kesehatan akibat pembalut sekali pakai, dan (4) keterbatasan akses ekonomi dan geografis.

Hasil advokasi menunjukkan peningkatan kesadaran dan adopsi pembalut kain, meskipun bersifat bertahap. Peserta *workshop* cenderung langsung beralih karena membuat sendiri, sementara penerima edukasi daring membutuhkan waktu lebih lama. Kolaborasi dengan komunitas seperti Rumah KEWITA di Papua berhasil mendorong distribusi pembalut kain dan perluasan edukasi ke jaringan lokal. Namun, hambatan seperti stigma menstruasi, beban ganda perempuan, biaya awal pembalut kain, dan kurangnya dukungan kebijakan masih menjadi tantangan.

"Tergantung ada ragamnya juga ya individu yang sudah terpapar edukasi kami, itu tidak semua langsung memiliki kesempatan untuk beralih, misalnya yang mendapatkan edukasi lewat sosial media tapi belum memiliki kesempatan untuk membeli pembalut kain, tapi menurut kami dia sudah memiliki pola pikir terhadap penggunaan pembalut kain. Kedua misalnya teman-teman yang mengikuti workshop di komunitas hampir semua menyatakan telah beralih karena mereka

membuat sendiri jadi dipakai. Masing-masing target peserta punya durasi untuk melakukan perubahan berbeda-beda.” Kak Ani (46), kategori informan I.

Biyung Indonesia melihat dominasi diskursus *mainstream* yang dikontrol oleh industri pembalut sekali pakai dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung alternatif berkelanjutan. Meski kemasan produk menggaungkan manfaat kesehatan, *Women’s Voices for The Health* melaporkan bahwa pembalut plastik juga mengandung empat zat kimiawi yang berbahaya, yaitu *acetone* yang memicu iritasi, *styrene* yang memicu kanker, *chloromethane* yang memicu gangguan syaraf dan reproduksi, dan *chloroethan* yang memicu gangguan kanker dan otot (Salsabila, 2019). Melalui petisi dan advokasi akar rumput, mereka berupaya membangun kesadaran kolektif untuk mendorong perubahan sistemik. Diskursus alternatif yang mereka tawarkan mencakup kesehatan holistik, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, menantang narasi dominan yang membatasi hak menstruasi. Dengan fokus pada edukasi dan kolaborasi komunitas, Biyung Indonesia menciptakan pondasi untuk perubahan jangka panjang dalam pengelolaan menstruasi di Indonesia.



Gambar 5. Informasi kemasan pembalut plastik sekali pakai dengan narasi kesehatan
Sumber: Peneliti (2025)

Di tingkat pengetahuan alternatif, Biyung membangun infrastruktur edukasi komprehensif berbasis *body literacy*. Sistem pendidikan mereka mencakup pemahaman siklus menstruasi 28 hari beserta kebutuhan gizi spesifik, teknik perawatan pembalut kain, serta hubungan antara kesehatan menstruasi dengan ekologi. Melalui *workshop* yang menyertakan sesi yoga menstruasi dan pendampingan komunitas produsen rumahan, mereka menciptakan ruang kontra-wacana yang menggeser persepsi masyarakat.

Perlawanan institusional dilakukan melalui strategi bertingkat. Di tingkat mikro, Biyung memobilisasi tekanan *bottom-up* melalui petisi ke Dinas Kesehatan DIY (2019-2020) yang menuntut penyediaan pembalut kain di puskesmas. Meskipun terhambat pandemi, upaya ini menjadi preseden penting dalam advokasi kebijakan. Di tingkat makro, mereka terlibat dalam forum global seperti Beijing +30 Conference untuk mendorong pengakuan hak kesehatan menstruasi dalam instrumen kebijakan internasional.

Kolaborasi dengan komunitas seperti Rumah KEWITA di Papua menunjukkan strategi perlawanan berbasis konteks lokal. Dengan memadukan pengetahuan tradisional tentang penggunaan kain dengan pendekatan modern, mereka menciptakan model pemberdayaan yang resisten terhadap dominasi produk komersial. Pendekatan "perempuan bantu perempuan" tidak hanya menjadi slogan, tetapi mekanisme perlawanan terhadap sistem patriarki yang mengontrol tubuh perempuan melalui produk menstruasi.

Dengan memposisikan pembalut kain sebagai simbol perlawanan, Biyung mentransformasikannya dari sekedar produk alternatif menjadi alat politik yang berdaya gugah. Setiap pembalut kain yang diproduksi oleh komunitas ini mewakili bentuk ketahanan terhadap dominasi industri bernilai miliaran dolar sekaligus kritik terhadap kebijakan publik yang abai terhadap keberlanjutan. Praktik tersebut tidak hanya mengubah perilaku individu, tetapi juga membangun kesadaran kolektif yang menjadi dasar bagi perubahan struktural dalam sistem kesehatan menstruasi di Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menyoroti bagaimana diskursus menstruasi dalam masyarakat masih didominasi oleh norma sosial yang menstigmatisasi menstruasi sebagai sesuatu yang tabu. Hal ini tercermin dalam kurangnya akses terhadap edukasi kesehatan menstruasi, terbatasnya pilihan produk menstruasi yang tersedia, serta minimnya fasilitas yang layak bagi perempuan dalam mengelola menstruasi mereka. Negara dan industri turut berperan dalam mempertahankan status quo ini dengan lebih mendorong penggunaan pembalut plastik tanpa menyediakan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Akibatnya, perempuan terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah mengalami kemiskinan menstruasi yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap produk sanitasi tetapi juga kurangnya kesadaran mengenai hak kesehatan menstruasi mereka sendiri.

Biyung Indonesia mencoba melakukan perlawanan dengan memunculkan diskursus alternatif terkait hak kesehatan menstruasi. Terbentuknya diskursus alternatif yang dibangun oleh Biyung Indonesia dalam kemiskinan menstruasi diwujudkan melalui advokasi dan edukasi pembalut kain sebagai alat pendukung menstruasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Saat ini, Biyung Indonesia memprioritaskan pembentukan kesadaran di tingkat masyarakat akar rumput sebelum memperluas advokasi ke ranah kebijakan. Strategi yang diterapkan adalah memberikan edukasi kepada kelompok yang siap menerima atau membutuhkan informasi tersebut. Biasanya, advokasi yang dilakukan oleh Biyung Indonesia bersifat kolaboratif, di mana mereka diundang untuk bekerja sama dengan komunitas yang memiliki kepedulian serupa. Dalam praktiknya, mereka mengedukasi tentang tubuh perempuan dan cara menjahit pembalut kain, memberdayakan komunitas produksi pembalut kain, serta menginisiasi program donasi "Period Sisters."

Hasil dari advokasi dan edukasi yang dilakukan Biyung Indonesia melahirkan diskursus alternatif dalam pengelolaan menstruasi. Diskursus ini mencakup persepsi pemakaian pembalut kain, pentingnya perawatan diri saat menstruasi, dan asupan gizi saat menstruasi, pengaruh stigma negatif masyarakat yang juga mencakup ketahanan pengaruh stigma negatif dan penggunaan istilah khusus dalam menstruasi, akses edukasi yang didapatkan, kesadaran terhadap lingkungan dan kesehatan, serta dukungan lingkungan sosial yang didapatkan. Dengan demikian, Biyung Indonesia tidak hanya menantang wacana dominan yang membatasi hak kesehatan menstruasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi perempuan untuk memiliki kendali lebih besar atas tubuh dan kesehatannya. Hal ini menunjukkan bahwa menstruasi bukan sekadar fenomena biologis, melainkan juga persoalan sosial yang mencerminkan relasi kekuasaan, dimana negara dan industri masih mendominasi wacana kesehatan menstruasi, namun gerakan sosial seperti Biyung Indonesia mampu menghadirkan narasi tandingan yang lebih inklusif dan memberdayakan.

Daftar Pustaka

- Agustin, W. (2024, 3 September). Menjamin hak kesehatan menstruasi. [sdgsyouthhub.id. https://sdgsyouthhub.id/berita-blog/blog/menjamin-hak-kesehatan-menstruasi](https://sdgsyouthhub.id/berita-blog/blog/menjamin-hak-kesehatan-menstruasi)
- Almira, R. (2020). Seksualitas yang lain: Studi tentang diskursus seksualitas kaum LGBTQ dan komunitas plush di Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/186004>
- Ar-Rahmah, N. K., Wonua, A. R., & Ismanto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Kesehatan Dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Beli Pada Produk Menstrual PAD: Studi Pada Tenaga Kerja Kesehatan Perempuan Di Puskesmas Pomalaa. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 1(4), 43-57. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v1i4.99>
- Bachri, S. F. (2021). Diskursus cuci tangan pada masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Purwokerto Kidul Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/646914
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social*, Jakarta: Kencana Prenama Media Group
- Dian, R. (2023, 24 Mei). Mengenal period poverty, krisis menghantui perempuan Indonesia. *Narasi Daily*. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/period-poverty-adalah>
- Dalam Pemberdayaan, P. L. P. Y. (2017). Participatory Learning and Action (PLA) di desa terpencil. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 81-98. <https://doi/10.14421/jpm.2017.011-05>

- Faiqah, A. N., & Puspitasari, N. (2023). Literature review: Penyebab dan dampak period poverty di Indonesia. *Media Gizi Kesmas*, 12(2), 1133-1144. <https://doi/10.20473/mgk.v12i2.2023.1133-1144>
- Fauzian, M. (2016). Analisis isi advokasi The Council on American-Islamic Relations (CAIR) dalam menangani isu Islamophobia di Amerika Serikat. *Jurnal HI*, 1-11.
- Gupta, J., Pouw, N. R., & Ros-Tonen, M. A. (2015). Towards an elaborated theory of inclusive development. *The European Journal of Development Research*, 27, 541-559. <https://doi/10.1057/ejdr.2015.30>
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Reformasi*, 10(1), 70-80.
- Hanina, T. (2022, 28 Januari). Perjalanan inspiratif Westiani Agustin, founder Biyung Indonesia. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/life/women/tyas-hanina-1/westiani-agustin-founder-biyung-indonesia-akuperempuan?page=all>
- Hadi, S. (2002). *Metodologi riset*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar rezim kepastian pemikiran kritis post-strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67.
- Kristianto, K., Ramadhan, A. B., & Marsetyo, F. D. (2021). Media sosial dan connective action: Studi kasus penggunaan Twitter sebagai ruang solidaritas selama pandemi COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 2(1), 1-13. <https://doi/10.22146/jsds.1037>
- Miletzki, J., & Broten, N. (2017). *An analysis of Amartya Sen's Development as Freedom*. Macat Library.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munif, W. (2022). Pengembangan konsep pemberdayaan perempuan kampung untuk mencegah kekerasan berbasis gender di Kampung Paluh Kabupaten Siak. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 1(1), 62-72.
- Noor, J. (2011). *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*.
- Rohmah, F. L. (2024). Pemberdayaan masyarakat dalam program Lumbung Mataraman melalui asset-based community development (Studi kasus: Lumbung Mataraman di Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul).
- Rokis, R., Hussein, S. F. S., Sulaiman, S., Tohid, N. F. M., & Komuniti, J. K. (2021). Memperkasakan keusahawanan sosial produk menstruasi bagi membasmi kemiskinan haid. *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled*.
- Sripambudi, G. I., Hilman, Y. A., & Triono, B. (2020). Strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan infrastruktur objek wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 38-50. <https://doi/10.37329/ganaya.v3i1.421>
- SS, P. G. (2021). *Perempuan-perempuan tanpa sayap: Akses dan strategi gelandangan di Yogyakarta terhadap sanitasi dan produk menstruasi (Disertasi Doktorat, Universitas Gadjah Mada)*.
- Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. *The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology*, 2, 17-37.
- Tohit, N. F. M., Komuniti, J. K., Hussien, S. F. A. B. S., Sulaiman, S., & Rokis, R. (2021). Kemiskinan haid: Krisis kesehatan awam yang perlu diakhiri. *Penduduk dan Keluarga Berkualiti*, 65.
- Tutut, L. (2014). *Perempuan desa, isu gender, dan pemberdayaan perempuan: Studi kasus kelompok pemberdayaan perempuan oleh Lembaga Bakti Indonesia di Desa Putatsari (Disertasi Doktorat, Universitas Gadjah Mada)*.
- Walby, S. (1989). Theorising patriarchy. *Sociology*, 23(2), 213-234. <https://doi/10.1177/0038038589023002004>
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Basil Blackwell.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods (Vol. 5)*. Sage.